

**LAMPIRAN .....**  
**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR**  
**NOMOR .... TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**TAHUN 2025**



**RENCANA KERJA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
**TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**2024**

## DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul .....	
Salinan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2023.....	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah .....	50
3.3 Tantangan dan Peluang .....	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	58
4.1 Perumusan Program dan Kegiatan disertai Target dan Pendanaan .....	58
4.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	85
BAB V PENUTUP .....	86

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan Tahun 2022 ....	10
<b>Tabel 2.2</b>	
Capaian Indikator tujuan dan sasaran OPD Unsur Pengawasan Tahun 2022 .....	12
<b>Tabel 2.3</b>	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah .....	15
<b>Tabel 2.4</b>	
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar .....	18
<b>Tabel 3.1</b>	
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar .....	54
<b>Tabel 4.1</b>	
Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024..	62
<b>Tabel 4.2</b>	
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar .....	85

## **PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Renstra yang telah disusun untuk masa 3 (tiga) tahun tersebut, renja ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pengawasan internal sejak perencanaan sampai dengan pengawasan dan pelaporan yang nantinya berguna dalam proses responsibilitas dan akuntabilitas di Tahun 2025 sesuai dengan amanat Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami berharap Renja ini dapat menjadi gambaran pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Kami juga menyadari bahwa Renja ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja ini. Semoga Allah SWT selalu meridoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Karanganyar, Maret 2024  
Plh. Inspektur Daerah  
Kabupaten Karanganyar,

WIDODO FERİYANTO, S.E., Ak., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19760922 200312 1 003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang menjadi acuan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan dan sistematis dari Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 3 (tahun) tahun. Renja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya termasuk kelompok sasaran, volume, satuan, lokasi dan pagu indikatif tahun 2025, serta prakiraan maju anggaran tahun 2026. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar wajib menyusun Renja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah lembaga pengawas internal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, dokumen Renja yang disusun juga berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu yang mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada prinsip - prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahunan juga diperlukan untuk mengadopsi perubahan kondisi termasuk resiko - resiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah karena perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan beresiko bias dan tidak

relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap dapat tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif. Tata cara penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah termaktub dalam Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Dengan Renja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Maka penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan rancangan awal Renja;
3. Penyusunan rancangan Renja;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah yang telah disusun mengacu pada RPD Tahun 2024-2026, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada RPD. Renja Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Karanganyar akan menjadi bagian dari RKPD Kabupaten Karanganyar. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Renja Perangkat Daerah adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja Perangkat Daerah

berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;**
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten



Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

19. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
20. **Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ...** Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Selain itu, Renja juga menggambarkan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Terakhir, Renja adalah sebagai wadah sinkronisasi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat Daerah sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat Daerah;
5. Agar Inspektorat Daerah mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi,

kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Renja ini diuraikan secara singkat dalam masing-masing sebagai berikut :

##### **BAB I      Pendahuluan**

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab selanjutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1   Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian Renja, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam penyusunan renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2   Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

##### **1.3   Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

##### **1.4   Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada bagian ini akan dijabarkan realisasi, capaian serta analisis dari Renja tahun sebelumnya, faktor-faktor penghambat tercapainya target serta kebijakan-kebijakan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan capaian *output* kegiatan pada Tahun 2023 yang dilengkapi dengan visual hasilnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, dan penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

## BAB III Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

Pada bagian ini menjabarkan tentang telaah terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan program pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran dengan jumlah program dan kegiatan.

### 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan data yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Memuat rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Daerah 2024-2026.

### 3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan Tantangan dan Peluang yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah.

## BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjabarkan tentang perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan serta penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

## BAB V Penutup

Pada bagian ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Perumusan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 didahului dengan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Renja Tahun 2023.

Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tahun ke lima pelaksanaan dokumen perencanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar, sehingga hasil evaluasi target kinerja 2023 dapat menilai efektifitas pelaksanaan dokumen perencanaan yang telah dibuat.

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Pengawasan pada tahun 2023 dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Kedua program tersebut terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2023 adalah sangat tinggi. Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan Tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.1 berikut

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan Tahun 2023**

No	Program	Indikator	Satuan	Tahun Terakhir RPJMD (2023)					Tahun 2024			
				Target	Capaian	%	Status		Target	%	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1) Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	98	95	103,16	Sangat Tinggi	Tercapai	-	-	-	-
		2) Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundangundangan	%	10	9	111,11	Sangat Tinggi	Tercapai	10	111,11	Sangat	Akan Tercapai
		3) Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	%	95	96	98,95	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	95	98,95	Tinggi	Akan Tercapai
		4) Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai	100	100	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
		5) Jumlah LHR LKPD	LHR LKPD	1	1	100	Sangat Tinggi	Tercapai	1	100	Sangat Tinggi	Akan Tercapai

2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	6) Persentasi tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai	100	100	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
		7) Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai	100	100	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
		8) Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai	100	100	Sangat Tinggi	Akan Tercapai

Sedangkan pencapaian Indikator tujuan dan sasaran OPD Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Capaian Indikator tujuan dan sasaran OPD Unsur Pengawasan Tahun 2023**

No	Indikator Tujuan OPD	Indikator Sasaran OPD	Satuan	Tahun Terakhir RPJMD (2023)					Tahun 2024			
				Target	Capaian	%	Status		Target	%	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	Level	3	3	100	Sangat Tinggi	Tercapai	3	100	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
		1) Turunnya Jumlah Temuan	%	5	5	100	Sangat Tinggi	Tercapai	-	-	-	-
		2) Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah	Temuan	250	152	164,47	Sangat Tinggi	Tercapai	-	-	-	-
		3) Jumlah temuan hasil pemeriksaan berupa inefisiensi/pemborosan anggaran	Temuan	0	0	100	Sangat Tinggi	Tercapai	-	-	-	-



		4) Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan bukti dukung pertanggung jawaban	Temuan	20	150	13,33	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	-	-	-	-
		5) Level Kapabilitas APIP	Level	3	3,00	100	Sangat Tinggi	Tercapai	3	3	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
		6) OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai	-	-	-	-

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.

Di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. Selain itu, disebutkan bahwa struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari terdapat 8 jabatan struktural terdiri dari 1 (satu) jabatan eselon II.b, 7 (tujuh) jabatan eselon III.a, dan 2 (dua) jabatan eselon IV.a.

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar didominasi oleh penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2023 diukur dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Merujuk pada norma dan standar pelayanan pada BPKP dan APIP lainnya. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3	3	3	2,634	2,879	3,168	3	3	
2.	Level Kapabilitas APIP	Level	Na	3	3	3	3	3	2,24	3	3	3	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa risiko serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi organisasi dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga harus dapat berperan sebagai pemberi konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat

Daerah tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*.

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai pada periode Renja Tahun 2025. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang mendukung Misi ketiga dari Kepala Daerah yaitu meningkatkan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik (*good government*) diharapkan dengan teratasinya permasalahan yang ada bisa menghasilkan hasil yang maksimal sehingga bisa mendukung RPJMN khususnya meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas serta mendukung tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terkait dengan penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan.

Identifikasi isu - isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Tuntutan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
3. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP;
4. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dimana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan karena beberapa alasan diantaranya:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan pada satuan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganya.
2. Untuk memperoleh gambaran penyebab adanya perbedaan tersebut sesuai rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan yang cocok namun besarnya berbeda.

Dibandingkan dengan rancangan awal RKPD 2024, maka RENJA tahun 2025 tidak ada perbedaan dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian amat penting untuk menyusun RENJA SKPD dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar**

RANCANGAN AWAL RKPD											HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								Catan Penti ng																	
Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024																					
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)																
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan																											
											Inspektorat Daerah											11.275.000.000,00		Inspektorat Daerah											11.275.000.000,00	
6											UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											11.275.000.000,00		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											11.275.000.000,00	
6	01										INSPEKTORAT DAERAH											11.275.000.000,00		INSPEKTORAT DAERAH											11.275.000.000,00	
6	01	01									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											9.050.000.000,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											9.050.000.000,00	
6	01	01	2.01								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											28.500.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											28.500.000,00	
6	01	01	2.01	0001							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
												Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	2 Dokumen	100 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	2 Dokumen	100 %	7.500.000,00							
6	01	01	2.01	0006							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Laporan	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Laporan	100 %	15.000.000,00		
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
					Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	2 Laporan	100 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	2 Laporan	100 %	6.000.000,00			
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6.808.500.000,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6.808.500.000,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
					Nilai SAKIP OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	48 Orang/bulan	100 %	6.750.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	48 Orang/bulan	100 %	6.750.000.000,00			

6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
					Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	2 Dokumen	100 %	32.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	2 Dokumen	100 %	32.000.000,00
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
					Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	12 Dokumen	100 %	6.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	12 Dokumen	100 %	6.500.000,00
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
					Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Dokumen	100 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Dokumen	100 %	7.500.000,00
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									



						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Laporan	100 %	6.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Laporan	100 %	6.500.000,00					
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
					Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	14 Laporan	100 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	14 Laporan	100 %	6.000.000,00						
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										230.000.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										230.000.000,00	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												

						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	144 Orang	100 %	230.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	144 Orang	100 %	230.000.000,00		
6	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah								518.000.000,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah								518.000.000,00	
6	01	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Paket	100 %	42.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Paket	100 %	42.000.000,00		
6	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor										Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Paket	100 %	38.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Paket	100 %	38.000.000,00		
6	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Paket	100 %	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Paket	100 %	70.000.000,00		

							Disedia kan							Umum							Disedia kan				Semu a Kel/ Desa						
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokum en Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang- Undang an yang Disedia kan	Terwuju dnya pelayan an adminis trasi perkant oran	Kab. Karang anyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	80 Nilai	2 Dokum en	100 %	3.000.000,00	Dana Tran sfer Umum -Dana Alok asi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokum en Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang- Undang an yang Disedia kan	Terwuju dnya pelayan an adminis trasi perkant oran	Kab. Kara ngan yar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	80 Nilai	2 Dokum en	100 %	3.000.000,00								
6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												Penyediaan Bahan/Material														
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disedia kan	Terwuju dnya pelayan an adminis trasi perkant oran	Kab. Karang anyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	80 Nilai	1 Paket	100 %	95.000.000,00	Dana Tran sfer Umum -Dana Alok asi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disedia kan	Terwuju dnya pelayan an adminis trasi perkant oran	Kab. Kara ngan yar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	80 Nilai	1 Paket	100 %	95.000.000,00								
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Fasilita si Kunjun gan Tamu	Terwuju dnya pelayan an adminis trasi perkant oran	Kab. Karang anyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	80 Nilai	12 Laporan	100 %	95.000.000,00	Dana Tran sfer Umum -Dana Alok asi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Fasilita si Kunjun gan Tamu	Terwuju dnya pelayan an adminis trasi perkant oran	Kab. Kara ngan yar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	80 Nilai	12 Laporan	100 %	95.000.000,00								

6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
					Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	12 Laporan	100 %	110.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	12 Laporan	100 %	110.000.000,00		
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
					Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1200 Dokumen	100 %	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1200 Dokumen	100 %	65.000.000,00		
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							790.000.000,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							790.000.000,00			
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
					Nilai SAKIP OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	3 Unit	100 %	600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	3 Unit	100 %	600.000.000,00		
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									Pengadaan Mebel										

						Nilai Sakip OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Unit	100 %	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Unit	100 %	60.000.000,00	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	5 Unit	100 %	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	5 Unit	100 %	55.000.000,00	
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	20 Unit	100 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	20 Unit	100 %	75.000.000,00	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									305.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									305.000.000,00
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Terwujudnya pelayanan administrasi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua	80 Nilai	12 Laporan	100 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Terwujudnya pelayanan administrasi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan	80 Nilai	12 Laporan	100 %	75.000.000,00	



							siap pakai								siap pakai	Kel/Desa																											
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																																						
					Nilai Sakip OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Unit	100 %	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Unit	100 %	60.000.000,00																					
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																																						
					Nilai Sakip OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	20 Unit	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	20 Unit	100 %	30.000.000,00																					
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																		1.700.000.000,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																		1.700.000.000,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal																		1.375.000.000,00		Penyelenggaraan Pengawasan Internal																		1.375.000.000,00
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		

						LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindak lanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrikr dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	4 Laporan	100 %	170.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindak lanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrikr dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	4 Laporan	100 %	170.000.000,00	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
					LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindak lanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrikr dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	32 Laporan	100 %	230.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindak lanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrikr dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	32 Laporan	100 %	230.000.000,00		





						LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindak lanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidapatuhan terhadap perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrikr dalam penyelesaian pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	41 Laporan	100 %	175.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindak lanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidapatuhan terhadap perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrikr dalam penyelesaian pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	41 Laporan	100 %	175.000.000,00	
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa										Pengawasan Desa								
					LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindak lanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidapatuhan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrikr dalam penyelesaian pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	44 Laporan	100 %	230.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindak lanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidapatuhan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrikr dalam penyelesaian pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	44 Laporan	100 %	230.000.000,00		



						LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindak lanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrikr dalam penyelesaian Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	42 Dokumen	100 %	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindak lanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrikr dalam penyelesaian Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	42 Dokumen	100 %	350.000.000,00	
6	01	02	2.02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							325.000.000,00		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							325.000.000,00	
6	01	02	2.02	0001		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah								
						Prosentase jumlah aduan yang ditindak lanjuti LHR LKPD Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrikr dalam penyelesaian Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 1 Laporan 10 % 95 %	25 Laporan	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase jumlah aduan yang ditindak lanjuti LHR LKPD Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrikr dalam penyelesaian Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 1 Laporan 10 % 95 %	25 Laporan	100 %	100.000.000,00	



6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									
					Present ase kesesua ian kegiata n pengaw asan dengan PKPT Present ase SKPD yang telah menera pkan SPIP pada level terdefini si Present ase tingkat kesadar an pelapor an kekayaa n pejabat negara dan ASN	Jumlah Rekome ndasi Kebijak an Teknis di Bidang Pengaw asan yang Disusu n	Terwuju dnya Rekome ndasi Kebijak an Teknis di Bidang Pengaw asan dan Fasilita si Pengaw asan	Kab. Karang anyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	100 % 100 % 100 %	1 Rekome ndasi	100 %	50.000.000,00	Dana Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m	Present ase kesesua ian kegiata n pengaw asan dengan PKPT Present ase SKPD yang telah menera pkan SPIP pada level terdefini si Present ase tingkat kesadar an pelapor an kekayaa n pejabat negara dan ASN	Jumlah Rekome ndasi Kebijak an Teknis di Bidang Pengaw asan yang Disusu n	Terwuju dnya Rekome ndasi Kebijak an Teknis di Bidang Pengaw asan dan Fasilita si Pengaw asan	Kab. Kara ngan yar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	100 % 100 % 100 %	1 Rekome ndasi	100 %	50.000.000,00	
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan								Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan									

						Present ase kesesua ian kegiata n pengaw asan dengan PKPT Present ase SKPD yang telah menera pkan SPIP pada level terdefini si Present ase tingkat kesadar an pelapor an kekayaa n pejabat negara dan ASN	Jumlah Rekome ndasi Kebijak an Teknis di Bidang Fasilita si Pengaw asan yang Disusu n	Terwuju dnya Rekome ndasi Kebijak an Teknis di Bidang Pengaw asan dan Fasilita si Pengaw asan	Kab. Karang anyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	100 % 100 % 100 %	1 Rekome ndasi	100 %	60.000.000,00	Dana Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m	Present ase kesesua ian kegiata n pengaw asan dengan PKPT Present ase SKPD yang telah menera pkan SPIP pada level terdefini si Present ase tingkat kesadar an pelapor an kekayaa n pejabat negara dan ASN	Jumlah Rekome ndasi Kebijak an Teknis di Bidang Fasilita si Pengaw asan yang Disusu n	Terwuju dnya Rekome ndasi Kebijak an Teknis di Bidang Pengaw asan dan Fasilita si Pengaw asan	Kab. Kara ngan yar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	100 % 100 % 100 %	1 Rekome ndasi	100 %	60.000.000,00		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi								415.000.000,00		Pendampingan dan Asistensi								415.000.000,00	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah										Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									

						Present ase SKPD yang telah menerima SPIP pada level terdefini si Present ase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT Present ase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pemandangan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	41 perangkat daerah	100 %	110.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Present ase SKPD yang telah menerima SPIP pada level terdefini si Present ase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT Present ase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pemandangan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	41 perangkat daerah	100 %	110.000.000,00	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
					Present ase SKPD yang telah menerima SPIP pada level terdefini si Present ase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT Present	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pemandangan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	5 perangkat daerah	100 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Present ase SKPD yang telah menerima SPIP pada level terdefini si Present ase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT Present	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pemandangan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	5 perangkat daerah	100 %	75.000.000,00		



						ase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN																	ase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN																		
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																			
						Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinsi Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	12 Kegiatan	100 %	105.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinsi Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	12 Kegiatan	100 %	105.000.000,00																			

6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
					Present ase SKPD yang telah menera pkan SPIP pada level terdefini si Present ase kesesua ian kegiata n pengaw asan dengan PKPT Present ase tingkat kesadar an pelapor an kekayaa n pejabat negara dan ASN	Jumlah Perangk at Daerah yang Dilakuk an Pendam pingan, Asistens i dan Verifika si Penegak an Integrit as	Terwuju dnya penyele nggaraa n pemerin tahan yang bersih dan akunta ble	Kab. Karang anyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	100 % 100 % 100 %	10 perangk at daerah	100 %	125.000.000,00	Dana Tran sfer Umum- Dana Alok asi Umum	Present ase SKPD yang telah menera pkan SPIP pada level terdefini si Present ase kesesua ian kegiata n pengaw asan dengan PKPT Present ase tingkat kesadar an pelapor an kekayaa n pejabat negara dan ASN	Jumlah Perangk at Daerah yang Dilakuk an Pendam pingan, Asistens i dan Verifika si Penegak an Integrit as	Terwuju dnya penyele nggaraa n pemerin tahan yang bersih dan akunta ble	Kab. Kara ngan yar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	100 % 100 % 100 %	10 perangk at daerah	100 %	125.000.000,00	
<b>TOTAL</b>											<b>11.275.000.000,00</b>											<b>11.275.000.000,00</b>

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

##### **A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 380 ayat (1) Bupati/walikota sebagai Kepala Daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD Kabupaten/Kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD) sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasarkan Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada ayat (4). Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat

pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, kelembagaan daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan daerah kabupaten/kota, pembangunan daerah kabupaten/kota, pelayanan publik di Daerah kabupaten/kota, kerja sama daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu. Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah kabupaten/kota.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Daerah berdasarkan kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023. Sampai saat ini Inspektorat Daerah sudah melaksanakan pengawasan yang terkait langsung dengan kebijakan nasional diantaranya peningkatan kapabilitas Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kegiatan Saber Pungli.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, diperlukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan

fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati Bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD.
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### B. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah **“Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”** yang akan dicapai dengan empat sasaran pembangunan daerah, meliputi :

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis

Isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 yang masih menjadi perhatian utama adalah berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu salah satunya adalah isu

kemiskinan. Isu tersebut berkaitan dengan isu strategis lainnya yang masih menjadi perhatian dalam pembangunan daerah Jawa Tengah di tahun 2025. Isu strategis tersebut sebagai berikut:

1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif
3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Kaitan Tata Kelola pemerintahan yang dinamis adalah Perubahan paradigma reformasi birokrasi tersebut menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan pola pikir sumber daya aparatur, yang secara simultan menuntut adanya proses adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama pada proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajemen organisasi berbasis risiko, riset, dan inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan), digitalisasi pemerintahan, dan penguatan pelayanan publik. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerjasama baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada :
  - a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui :
    - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta

- meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
- 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
  - 3) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
  - 4) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
  - 5) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
  - 6) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah.
- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui :
- 1) Peningkatan pelayanan perijinan, akses permodalan, subsidibunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
  - 2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
  - 3) Pemenuhan kebutuhan layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi sarana

- prasarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas Puskesmas;
- 4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan.
- c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.
  - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi.
  - e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada :
- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, Anak Tidak Sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas stakeholder, serta optimalisasi peran fungsi



instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS.

- b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan *baseline* data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi; digitalisasi layanan di faskes primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta KLB/Krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasyankes dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas.
- c. Meningkatkan kesadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugur, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet.
- d. Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid.
- e. Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda.
- f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat.

- g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender.
  - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung, fokus pada :
- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan lahan berbasis masyarakat, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif.
  - c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan sarana prasarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir.
  - d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/Early Warning System (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster
  - e. penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.
4. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada :
- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan

peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesejangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT.

- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antar pemerintah, dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah.

Kebijakan Nasional dan Propinsi tersebut yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah **“Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi”**. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Daerah memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan

penerapan sistem pengendalian manajemen. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 yang ingin dicapai Kabupaten Karanganyar dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Inspektorat Daerah. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026) ke depan diharapkan Inspektorat Daerah akan dapat mencapai sasaran strategis. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP OPD;
- b. Meningkatkan maturitas SPIP, dengan indikator sasaran Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat Daerah, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah **Misi Ketiga Bupati yaitu Meningkatkan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik (*good government*)**.

Dalam hal mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian internal mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan sesuai peran APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting partner*, untuk mewujudkan unit-unit kerja yang bersih dan bebas KKN dan mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah di Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kelurahan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi yaitu:

1. Perencanaan Program Pengawasan;
2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah**

Berdasarkan dokumen RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebagai berikut :

#### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah.

Mengacu pada *grand design* 8 area perubahan pada reformasi birokrasi yaitu :

##### **a. Manajemen perubahan**

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

c. Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi kementerian / lembaga / pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

d. Penataan ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Program ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompentensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

f. Penguatan pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari

program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.

g. Penguatan akuntabilitas kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).

h. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah fokus terhadap poin (f), yaitu Penguatan Pengawasan, dan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dijelaskan bahwa pada tahun 2025 diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme, maka dalam RENSTRA 2024-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 3 (tiga) tahun sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah **“Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi”** dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.



## 2. Sasaran

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP OPD dan Meningkatkan maturitas SPIP, dengan indikator sasaran Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	78	78	79	80	80	80
		2. Meningkatkan maturitas SPIP	1. Maturitas SPIP	Level	2,87	3	3	3	3	3
			2. Kapabilitas APIP	Level	2,24	3	3	3	3	3

### 3.3 Tantangan dan Peluang Inspektorat Daerah

Dengan diterapkannya otonomi daerah mengakibatkan beban tugas Lembaga Pengawas Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah) semakin luas dan kompleks sedangkan sumber daya aparatur baik secara kuantitas relatif masih kurang, disamping itu Kabupaten Karanganyar memiliki wilayah yang luas sehingga pelaksanaan pengawasan yang memadai dengan beban kerja yang dihadapi menjadi kurang optimal, disamping itu pula peraturan perundang-undangan yang semakin berkembang dan berubah-ubah khususnya dalam hal tata kelola kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana dan prasarana, berpengaruh terhadap pemahaman para *stakeholder* baik sebagai pelaku yang menjalankan regulasi maupun sebagai pelaku yang memiliki tugas kontrol (pengawasan). Adapun secara rinci tantangan terhadap pengembangan pelayanan di bidang pengawasan dan pembinaan atas tata Kelola pemerintahan di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya pejabat fungsional secara kuantitas yang tidak sepadan/sebanding dengan objek pengawasan (Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan), sehingga memiliki resiko kerja yang tinggi.

Dalam penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Internal, Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan sebanyak 80 obrik, Reviu LKPD dan Laporan Keuangan sebanyak 10 OPD Sample, Reviu RKA dan RKAP sebanyak 42 OPD dan Evaluasi SAKIP sebanyak 41 OPD.

Dalam penyusunan Tim untuk melakukan pemeriksaan tidak berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, namun berdasarkan kompetensi yang dimiliki, termasuk penunjukan Pengawas/Pemeriksa sebagai Pengendali Teknis dan Ketua Tim. Dari data kepegawaian Tahun 2025, jumlah SDM sebagai Pengawas/Pemeriksa sebanyak 33 orang terdiri dari 27 orang Auditor, 6 orang P2UPD. Pengawas/Pemeriksa bersertifikat sebagai Pengendali Teknis dan Ketua Tim yang bersertifikat sebanyak 24 orang, terdiri dari : Pengendali Teknis sebanyak 10 orang dan Ketua

Tim sebanyak 14 orang. Dengan minimnya jumlah Pengawas/Pemeriksa yang melaksanakan tugas, dengan pengiriman SDM mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi akan mengurangi jumlah SDM dan berdampak pada kualitas hasil pengawasan.

Upaya mengatasi kekurangan jumlah Pengawas/Pemeriksa dibandingkan target dan sasaran pengawasan setahun dengan cara mengikutsertakan SDM Pengawas/JFU pada Sekretariat, dan terkadang untuk kasus-kasus *emergency* mengambil personil yang sedang bertugas (*overlapp*) tugas.

2. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang bagi pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan, diantaranya kendaraan dinas operasional yang memadai dan alat uji pemeriksaan fisik, hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Inspektorat Daerah terhadap Objek Pengawasan.

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat Daerah.

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat Daerah ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

2. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil

pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

### 3. Sumber Daya Manusia yang berintegritas.

Inspektorat Daerah telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Perumusan Program dan Kegiatan disertai Target dan Pendanaan**

Dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam usulan renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 diproyeksi bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Proyeksi pendanaan tersebut merupakan usulan SKPD yang bersumber dari dokumen perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 dapat dijelaskan melalui uraian sebagai berikut :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - 3) Evaluasi Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
  - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD;

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - 5) Penyediaan Bahan/Material;
  - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Operasional atau Lapangan;
  - 2) Pengadaan Mebel;
  - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
  - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
  - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - 3) Reviu Laporan Kinerja;
  - 4) Reviu Laporan Keuangan;
  - 5) Pengawasan Desa;
  - 6) Kerjasama Pengawasan Internal;
  - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
  - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
  - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

## **3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
  - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b. Pendampingan dan Asistensi.
  - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
  - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Program dan kegiatan yang direncanakan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Hal ini dikarenakan seluruh target kegiatan yang akan dilaksanakan sudah diperhitungkan dengan matang dan sesuai dengan dokumen perencanaan baik RPD maupun Renstra.



Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (*outcomes*)/kegiatan (*output*) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 adalah sebagaimana Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA TAHUN 2024	TARGET 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
			Inspektorat Daerah					11.275.000.000,00							11.441.750.000., 00	
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					11.275.000.000,00							11.441.750.000., 00	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH					11.275.000.000,00							11.441.750.000., 00	
1	6	01	01					9.050.000.000,00							9.140.500.000,00	
	6	01	01	2.01				28.500.000,00							32.500.000	
	6	01	01	2.01	0001											

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Karanga nyar, Karanga nyar, Cangak an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintah n yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintah n berbasis digital dan kolaboratif	-	2 Dokumen	8.000.000	INSPEKTORA T DAERAH	
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Karanga nyar, Karanga nyar, Cangak an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintah n yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintah n berbasis digital dan kolaboratif	-	1 Laporan	17.500.000	INSPEKTORA T DAERAH		
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangkakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	2 Laporan	7.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6.808.500.000,00							6.864.000.000	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	12 Bulan	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	6.750.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangkakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	48 Orang/bulan	6.800.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															

						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	70 PAK	2 Dokumen	2 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	2 Dokumen	35.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	12 Dokumen	7.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															

						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	1 Dokumen	8.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	1 Laporan	7.000.000	INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	6.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	14 Laporan	7.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						230.000.000,00								240.000.000		
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	12 Bulan	48 Orang	48 Orang	230.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	48 Orang	240.000.000	INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						518.000.000,00								574.000.000		
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																

						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	42.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	1 Paket	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	38.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	1 Paket	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan															



						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	1 Paket	80.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12 Bulan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	2 Dokumen	4.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material															

						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	95.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	1 Paket	100.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2100 Doss Snack dan Makan	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	12 Laporan	100.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	12 Laporan	120.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen	12 Bulan	1200 Dokumen	1200 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	1200 Dokumen	70.000.000	INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						790.000.000,00								710.000.000		
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	600.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	3 Unit	500.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	1 Unit	70.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Paket	1 Unit	5 Unit	55.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	5 Unit	60.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	-	20 Unit	20 Unit	75.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	20 Unit	80.000.000	INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							305.000.000,00							320.000.000		
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Karangan- nyar, Semua Kecama- tan, Semua Kel/Des- a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintah- an yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintah- an berbasis digital dan kolaboratif	-	12 Laporan	80.000.000	INSPEKTORA T DAERAH	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	Kab. Karangan- nyar, Semua Kecama- tan, Semua Kel/Des- a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintah- an yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintah- an berbasis digital dan kolaboratif	-	12 Laporan	240.000.000	INSPEKTORA T DAERAH	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						370.000.000,00							400.000.000,00		
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	24 Unit	27 Unit	27 Unit	230.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	27 Unit	240.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1 Paket	15 Unit	15 Unit	50.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	15 Unit	60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Paket	1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	1 Unit	65.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	1 Paket	20 Unit	20 Unit	30.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	20 Unit	35.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
2	6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							1.700.000.000,00							1.750.000.000		
	6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal							1.375.000.000,00							1.420.000.000		
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah															



						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	8 Laporan	16 Laporan	4 Laporan	170.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	4 Laporan	175.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah															
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	32 Laporan	230.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	32 Laporan	240.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja															

						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	42 Laporan	41 Laporan	42 Laporan	42 Laporan	85.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	42 Laporan	90.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan															
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	175.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	41 Laporan	180.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa															

						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	44 Laporan	230.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	44 Laporan	235.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	12 Bulan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	135.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	1 Kesepakatan	135.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																

						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	42 Dokumen	41 Obrik	42 Dokumen	42 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	42 Dokumen	365.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						325.000.000,00								330.000.000	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah															
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	25 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	25 Laporan	100.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	25 Laporan	100.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu															

						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan	15 Laporan	12 Laporan	20 Laporan	225.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	16 Laporan	230.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					525.000.000,00							551.250.000	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					110.000.000,00							111.250.000	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan													
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	Level 3	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	50.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	1 Rekomendasi	51.250.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan													

						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 PKPT	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	60.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	1 Rekomendasi	60.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi							415.000.000,00							440.000.000	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah															
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 perangkat daerah	42 perangkat daerah	41 perangkat daerah	41 perangkat daerah	110.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	41 perangkat daerah	113.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi															

						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 perangkat daerah	12 perangkat daerah	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	75.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	5 perangkat daerah	77.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi															
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	7 Laporan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	105.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	12 Kegiatan	120.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas															

															Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah	1 Kegiatan	5 perangkat daerah	10 perangkat daerah	125.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	10 perangkat daerah	130.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	------------	--------------------	---------------------	----------------	---	--------------------------------------	---	--	---	---------------------	-------------	--------------------



#### 4.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar hanya membuat program dan kegiatan lingkup pembinaan dan pengawasan regular melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta pengembangan aparatur pengawasan sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi, masyarakat dapat mengajukan laporan melalui pengaduan masyarakat atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus/kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun  
2025 Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		<b>NIHIL</b>			

## **BAB V PENUTUP**

Rencana kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan Perubahan RPJMD, disesuaikan dengan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, perhitungan kebutuhan sesuai standarisasi harga barang dan jasa yang baru, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Akhir kata, dengan tersusunnya rencana kinerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (*outcome*) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO



Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kabid Litbang dan Penyusunan Program Baperlitbang	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan Perubahan RPJMD, disesuaikan dengan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, perhitungan kebutuhan sesuai standarisasi harga barang dan jasa yang baru, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Akhir kata, dengan tersusunnya rencana kinerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (*outcome*) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

